

**ANALISIS KAUSALITAS ANTARA MIGRASI, PENGANGGURAN, DAN  
KEMISKINAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S1) Pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas  
Ekonomi Universitas Negeri Padang**



**OLEH :**

**ANNA WILLIA GLORINA**  
**NIM. 15060035/2015**

**JURUSAN ILMU EKONOMI**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2019**

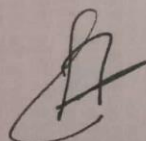
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS KAUSALITAS ANTARA MIGRASI, PENGANGGURAN, DAN  
KEMISKINAN DI INDONESIA

Nama : Anna Willia Glorina  
NIM/TM : 15060035/2015  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Keahlian : Ekonomi Sumber Daya Manusia  
Fakultas : Ekonomi

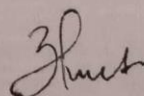
Padang, Juni 2019

Disetujui Oleh:  
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



Drs. Ali Anis, MS  
NIP. 19591129 198602 1001

Diketahui Oleh:  
Pembimbing



Dr. Sri Ulfa Sentosa, MS  
NIP. 1961 0502 198601 2001



## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

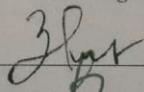
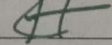
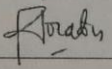
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

### ANALISIS KAUSALITAS ANTARA MIGRASI, PENGANGGURAN, DAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Nama : Anna Willia Glorina  
NIM/TM : 15060035/2015  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Keahlian : Ekonomi Sumber Daya Manusia  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juni 2019

Tim Penguji:

| No | Jabatan | Nama                       | TandaTangan                                                                              |
|----|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ketua   | : Dr. Sri Ulfa Sentosa, MS | 1.  |
| 2  | Anggota | : Drs. Ali Anis, MS        | 2.  |
| 3  | Anggota | : Melti Roza Adry, SE., ME | 3.  |



Scanned with  
CamScanner

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Anna Willia Glorina  
NIM / TahunMasuk : 15060035/2015  
Tempat / Tanggal Lahir : Padang/13 Maret 1997  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Keahlian : Ekonomi Sumber Daya Manusia  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Komplek Jondul IV Blok AA3 Tabing, Padang  
No. HP / Telepon : 08887435526  
JudulSkripsi : Analisis Kausalitas antara Migrasi, Pengangguran,  
dan Kemiskinan di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis / skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis / skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis / skripsi ini **Sah** apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis / skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Juni 2019  
METERAI  
TEMPEL  
AC0A9AFF700102528  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
Anna willia Glorina  
NIM.15060035



Scanned with  
CamScanner

## ABSTRAK

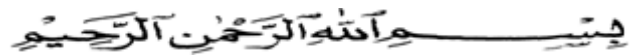
**Anna Willia Glorina (2015 / 15060035) : Analisis Kausalitas antara Migrasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, dengan Dosen Pembimbing Ibu Dr. Sri Ulfa Sentosa, MS.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ; (1) Apakah terdapat hubungan kausalitas antara migrasi dan pengangguran di Indonesia, (2) Apakah terdapat hubungan kausalitas antara migrasi dan kemiskinan di Indonesia, (3) Apakah terdapat hubungan kausalitas antara pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan asosiatif.

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Pada analisis induktif terdapat beberapa uji yaitu : (1) Uji Akar Root (*Unit Root Test*), (2) Uji Kointegrasi (*Cointegration Test*), (3) Uji Lag Optimum, (4) Uji Kausalitas Granger (*Granger Causality Test*), (5) Uji Stabilitas (*Stability Test*), (6) Uji Respon Variabel (*Impulse Respon Function*), dan (7) Uji Kontribusi Variabel (*Variance Decomposition*).

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa; (1) Tidak terdapat kausalitas antara migrasi dan pengangguran di Indonesia, namun hanya terdapat hubungan satu arah yang positif antara pengangguran terhadap migrasi. Artinya semakin banyak masyarakat yang menganggur, maka semakin banyak pula masyarakat yang memilih untuk melakukan migrasi, (2) Terdapat hubungan kausalitas antara migrasi dan kemiskinan di Indonesia. Artinya semakin banyak masyarakat yang bermigrasi maka semakin banyak penambahan jumlah masyarakat miskin dikarenakan tidak mampu bersaing untuk mendapatkan pendapatan. Di sisi lain, kemiskinan mengakibatkan semakin banyak masyarakat yang ingin bermigrasi dengan tujuan ingin merubah nasib/ taraf hidup, (3) Terdapat hubungan kausalitas antara pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Artinya semakin banyak masyarakat yang menganggur dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup maka semakin banyak masyarakat yang tergolong miskin. Begitu pun kemiskinan mengakibatkan masyarakat tidak mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dikarenakan modal dan kemampuan yang terbatas.

## KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia serta rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Kausalitas antara Migrasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia”**. Penulisan skripsi ini adalah sebagai tugas akhir yang merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan, sehingga segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis untuk menjadi lebih baik dikemudian hari. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri penulis serta pihak-pihak terkait lainnya.

Selama proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Ali Anis, MS selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Ibu Melti Roza Adry, SE, ME selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dr. Sri Ulfa Sentosa, MS selaku Pembimbing penulis yang telah membimbing, memberikan motivasi, serta arahan dan dengan sabar mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Ali Anis, MS dan Ibu Melti Roza Adry, SE, ME selaku tim penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama penulis melakukan perkuliahan.

6. Teristimewa kepada Papa dan Mama tercinta yaitu Herman Muslim, BA dan Wirdanelli, BA yang telah memberikan do'a setiap saat serta dalam setiap sujudnya juga dukungan untuk penulis baik moril maupun materil dan semangat yang selalu terbawa melalui perantara do'a. Terimakasih Pah, Mah.
7. Kepada Kakakku tersayang Windy Caprina, S.AP dan Gita Cloudia Marina, S.AP, serta Adikku tersayang Henny Julia Regina dan Sonya Mutiara Saqina yang menjadi sumber semangat paling besar setelah Papa dan Mama.
8. Untuk Geng Alis-Alis Manjah (Della Zubaidah, Nadya Gaek, dan Desik Marmut) yang paling setia menemani penulis saat susah maupun senang dari zaman perkuliahan sampai ke zaman perskripsian, terutama atas kesabaran selama ini untuk menunggu penulis saat Touch Up. Really, Thank's.
9. Kepada Dimas Bagus Prayoga, SE (Bangdim) dan Muhammad Alghifari, SE (Papskiku) yang memiliki andil besar dalam memberikan solusi atas keluhan kesah perskripsian penulis.
10. Kepada para sahabat tersayang Nadia Kurnianti, Lustyana Yusuf, Iqbal Amru, Agung Saputra, Oscar Ananda, dan Fidel Adam yang selalu ada untuk penulis dari masa SMA sampai sekarang. Thank's.
11. Teruntuk sahabat tersayang "Loh Kok Gak Ngerti" (Farid Artis, Luqy Mr. Melow, dan Ejak Irsyadilah The Avengers) yang sudah memberikan warna tersendiri dalam lucunya dunia perkampusan.
12. Kepada para sahabat Ekonomi Sumber Daya Manusia (SEquad ESDM) 2015 yang telah memberikan support yang amat berarti bagi penulis.
13. Kepada rekan satu tim HMJ IE FE UNP atas pengalaman dan kerjasama 2 periode yang amat berkesan bagi penulis, terkhusus untuk para Ketum yakni Nandi Pinto, SE dan Fadil Ananta Piskha, SE.
14. Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang angkatan 2015 atas support, bantuan, serta dukungan yang amat berarti bagi penulis.

15. Kepada senior maupun junior Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah bersedia membantu dan memberikan semangat serta motivasi kepada penulis sehingga selesainya skripsi ini.
16. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Selanjutnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya, Amin. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dari semua pihak.

Padang,        Juli 2019  
Penulis

Anna Willia Glorina  
NIM. 15060035

## DAFTAR ISI

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                        | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                  | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                      | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                   | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                   | <b>vii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                               | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah .....                             | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                                    | 11         |
| C. Tujuan Penelitian .....                                  | 12         |
| D. Manfaat Penelitian .....                                 | 12         |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>    | <b>13</b>  |
| A. Kajian Teori .....                                       | 13         |
| 1. Migrasi .....                                            | 13         |
| 2. Pengangguran.....                                        | 15         |
| 3. Kemiskinan .....                                         | 17         |
| B. Hubungan Antar Variabel .....                            | 18         |
| 1. Kausalitas Migrasi dan Pengangguran.....                 | 18         |
| 2. Kausalitas Migrasi dan Kemiskinan .....                  | 20         |
| 3. Kausalitas Pengangguran dan Kemiskinan.....              | 22         |
| C. Penelitian Terdahulu .....                               | 23         |
| D. Kerangka Konseptual.....                                 | 24         |
| E. Hipotesis.....                                           | 25         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                      | <b>27</b>  |
| A. Jenis Penelitian .....                                   | 27         |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian .....                        | 27         |
| C. Jenis dan Sumber Data.....                               | 27         |
| D. Teknik Pengumpulan Data.....                             | 28         |
| E. Defenisi Operasional .....                               | 28         |
| F. Teknik Analisis Data .....                               | 29         |
| 1. Analisis Vector Auto Reggression.....                    | 31         |
| 2. Model Analisis Vector Auto Reggression.....              | 31         |
| 3. Langkah-Langkah Analisis Vector Auto Reggression.....    | 32         |
| 4. Implementasi Model Analisis Vector Auto Reggression..... | 41         |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b> | <b>43</b> |
| A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian .....          | 43        |
| B. Hasil Penelitian .....                          | 45        |
| 1. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....    | 45        |
| 2. Analisis Induktif.....                          | 53        |
| B. Pembahasan.....                                 | 71        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                         | <b>77</b> |
| A. Simpulan .....                                  | 77        |
| B. Saran.....                                      | 78        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                        | <b>79</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                               | <b>81</b> |

## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                                  |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 | Jumlah Migrasi Masuk Seumur Hidup Per Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2017 .....                | 3  |
| Tabel 1.2 | Laju Perkembangan Migrasi Masuk Seumur Hidup Per Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2017 .....     | 5  |
| Tabel 1.3 | Jumlah Pengangguran Terbuka Per Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2017 .....                      | 8  |
| Tabel 1.4 | Jumlah Penduduk Miskin Per Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2017 .....                           | 10 |
| Tabel 4.1 | Uji Stasioneritas Variabel Migrasi .....                                                         | 54 |
| Tabel 4.2 | Uji Stasioneritas Variabel Pengangguran .....                                                    | 55 |
| Tabel 4.3 | Uji Stasioneritas Variabel Kemiskinan.....                                                       | 55 |
| Tabel 4.4 | Uji Kointegrasi Variabel Migrasi, Pengangguran dan Kemiskinan .....                              | 57 |
| Tabel 4.5 | Uji Lag Optimum.....                                                                             | 58 |
| Tabel 4.6 | Hasil Output Granger Causality Variabel Migrasi, Pengangguran, dan Kemiskinan .....              | 59 |
| Tabel 4.7 | Estimasi Panel Vector Autoregression (PVAR) Variabel Migrasi, Pengangguran, dan Kemiskinan ..... | 61 |
| Tabel 4.8 | Hasil Analisis Variance Decomposition Migrasi, Pengangguran, dan Kemiskinan .....                | 67 |

## DAFTAR GAMBAR

|             |                                                                                                               |    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1  | Kerangka Konseptual Analisis Kausalitas Antara Migrasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia Tahun ..... | 25 |
| Gambar 4.1  | Perbandingan Luas Wilayah dan Persentase Jumlah Penduduk Tahun 2017.....                                      | 44 |
| Gambar 4.2  | Jumlah Migrasi, Pengangguran, dan Penduduk Miskin di Pulau Sumatera Tahun 2013-2017 .....                     | 46 |
| Gambar 4.3  | Jumlah Migrasi, Pengangguran, dan Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2013-2017.....                          | 47 |
| Gambar 4.4  | Jumlah Migrasi, Pengangguran, dan Penduduk Miskin di Pulau Kalimantan Tahun 2013-2017 .....                   | 47 |
| Gambar 4.5  | Jumlah Migrasi, Pengangguran, dan Penduduk Miskin di Pulau Sulawesi Tahun 2013-2017 .....                     | 48 |
| Gambar 4.6  | Jumlah Migrasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Pulau Papua Tahun 2013-2017.....                              | 49 |
| Gambar 4.10 | Hasil Uji Stabilitas VAR .....                                                                                | 64 |
| Gambar 4.11 | Hasil Uji Impulse Response Function Variabel Migrasi, Pengangguran, dan Kemiskinan .....                      | 66 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat di dunia. Dimana penduduk Indonesia tersebar luas pada beberapa provinsi dan jumlahnya semakin bertambah tiap waktunya. Dinamika kependudukan terjadi karena adanya dinamika kelahiran, kematian, serta perpindahan penduduk (migrasi) terhadap komposisi dan pertumbuhan penduduk (Pratama,2013). Migrasi merupakan fenomena perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain, baik antar negara maupun dalam suatu negara. Arus migrasi yang terjadi tentu memberikan dampak pada daerah asal serta daerah tujuan.

Borjas (2000) menyatakan bahwa migrasi ditentukan oleh umur, pendidikan, jarak, serta faktor lainnya. Pada dasarnya, masyarakat melakukan migrasi disebabkan oleh beberapa hal, seperti pekerjaan, sektor ekonomi pada suatu daerah, budaya, serta lainnya. Hal tersebut juga tidak terlepas dari daya tarik daerah tujuan, sehingga masyarakat tertarik untuk bermigrasi ke daerah tersebut.

Namun bagi negara berkembang, khususnya di Indonesia, lonjakan arus migrasi mengakibatkan menumpuknya tenaga kerja pada suatu daerah, sedangkan jumlah lapangan kerja yang tersedia pada daerah tersebut tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduknya. Padahal seharusnya, penyebaran tenaga kerja pada tiap daerah merata agar laju pertumbuhan perekonomian pun merata di tiap daerah. Sehingga dalam jangka panjang timbul masalah ketidak sesuaian antara laju pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lapangan pekerjaan.

Fenomena lebih dari setengah penduduk di Indonesia telah menjadi penduduk perkotaan dengan kondisi yang perlu dijadikan acuan dalam pembangunan di kota-kota pada masa yang akan datang. Kota-kota besar memegang berbagai peranan penting di sebuah negara, seperti menjadi pusat perekonomian dan pusat pemerintahan. Kondisi kepadatan penduduk perkotaan ini juga didukung oleh teori *The Human Capital Model*, dimana dalam teori ini dijelaskan bahwa masyarakat yang melakukan migrasi dipengaruhi oleh motivasi untuk mencari kesempatan kerja serta pendapatan yang lebih baik. Menurut Todaro (2000) keputusan seseorang untuk melakukan migrasi adalah respon dari harapan untuk mendapatkan kesempatan kerja serta pendapatan yang lebih baik sebab perbedaan upah antara desa yang kota. Dengan semakin modernnya dan majunya kondisi ekonomi serta sosial di perkotaan, maka hal ini menjadi daya tarik terkuat bagi tenaga kerja terampil untuk bermigrasi ke daerah perkotaan.

Mobilitas penduduk dibagi menjadi 2 kategori, yakni migrasi internasional dan migrasi internal. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk melewati batas suatu negara, sedangkan migrasi internal adalah perpindahan penduduk dalam suatu kawasan negara/ melewati batas administratif suatu wilayah seperti desa, kota atau provinsi.

Ketimpangan antar wilayah yang ada di Indonesia, menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk berpindah dari wilayah yang kurang baik perekonomiannya ke daerah yang memiliki perekonomian lebih baik seperti di perkotaan. Berikut data jumlah migran masing-masing provinsi di Indonesia :

**Tabel 1.1**  
**Migran Masuk Seumur Hidup Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2017**

| No          | Provinsi             | Jumlah Migrasi Masuk (Jiwa) |           |           |           |           | MEAN      |
|-------------|----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|             |                      | 2013                        | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      |           |
| 1           | Aceh                 | 151.919                     | 209.815   | 158.921   | 179.349   | 206.693   | 181.339   |
| 2           | Sumatera Utara       | 460.407                     | 519.843   | 473.251   | 455.251   | 523.423   | 486.435   |
| 3           | Sumatera Barat       | 284.425                     | 358.123   | 313.767   | 335.251   | 405.862   | 339.486   |
| 4           | Riau                 | 1.855.678                   | 1.881.079 | 1.768.780 | 1.818.620 | 2.025.571 | 1.869.946 |
| 5           | Jambi                | 662.148                     | 710.428   | 668.625   | 661.193   | 706.016   | 681.682   |
| 6           | Sumatera Selatan     | 915.856                     | 966.060   | 927.953   | 873.760   | 920.163   | 921.324   |
| 7           | Bengkulu             | 342.609                     | 337.041   | 300.679   | 327.589   | 347.659   | 331.115   |
| 8           | Lampung              | 1.360.200                   | 1.362.387 | 1.339.295 | 1.354.941 | 1.327.339 | 1.348.832 |
| 9           | Kep. Bangka Belitung | 188.644                     | 192.729   | 172.484   | 190.750   | 228.717   | 195.644   |
| 10          | Kep. Riau            | 825.360                     | 881.035   | 805.458   | 834.207   | 913.077   | 858.444   |
| 11          | DKI Jakarta          | 3.555.571                   | 3.647.328 | 3.641.609 | 3.850.641 | 3.719.635 | 3.682.957 |
| 12          | Jawa Barat           | 4.294.254                   | 4.961.541 | 4.733.520 | 4.593.236 | 5.702.274 | 4.856.965 |
| 13          | Jawa Tengah          | 856.695                     | 1.015.615 | 964.889   | 955.002   | 1.019.485 | 962.337   |
| 14          | DI Yogyakarta        | 537.287                     | 571.948   | 565.266   | 559.645   | 608.135   | 568.456   |
| 15          | Jawa Timur           | 730.756                     | 924.152   | 852.831   | 882.122   | 967.175   | 871.407   |
| 16          | Banten               | 2.538.669                   | 2.491.589 | 2.520.255 | 2.466.230 | 2.520.248 | 2.507.398 |
| 17          | Bali                 | 355.280                     | 428.511   | 362.179   | 423.108   | 464.693   | 419.623   |
| 18          | Nusa Tenggara Barat  | 74.098                      | 121.828   | 97.764    | 115.354   | 120.939   | 105.997   |
| 19          | Nusa Tenggara Timur  | 165.711                     | 176.608   | 174.336   | 178.261   | 217.517   | 182.487   |
| 20          | Kalimantan Barat     | 262.309                     | 293.992   | 264.655   | 283.890   | 293.155   | 278.528   |
| 21          | Kalimantan Tengah    | 466.036                     | 527.473   | 508.741   | 514.623   | 562.889   | 515.952   |
| 22          | Kalimantan Selatan   | 467.942                     | 509.967   | 484.881   | 490.060   | 493.749   | 498.135   |
| 23          | Kalimantan Timur     | 1.250.146                   | 1.120.017 | 971.840   | 1.083.022 | 1.190.547 | 1.160.933 |
| 24          | Kalimantan Utara     | -                           | 189.396   | 181.654   | 220.466   | 229.524   | 164.208   |
| 25          | Sulawesi Utara       | 172.108                     | 188.136   | 147.753   | 158.093   | 191.106   | 171.439   |
| 26          | Sulawesi Tengah      | 447.770                     | 465.614   | 426.757   | 432.298   | 462.578   | 446.812   |
| 27          | Sulawesi Selatan     | 302.674                     | 346.168   | 330.760   | 387.678   | 426.152   | 365.668   |
| 28          | Sulawesi Tenggara    | 438.084                     | 443.602   | 413.812   | 437.455   | 460.898   | 438.770   |
| 29          | Gorontalo            | 57.765                      | 64.448    | 65.246    | 67.799    | 63.035    | 63.659    |
| 30          | Sulawesi Barat       | 173.535                     | 175.283   | 163.942   | 163.879   | 180.152   | 171.358   |
| 31          | Maluku               | 114.508                     | 134.500   | 117.594   | 119.798   | 136.964   | 122.216   |
| 32          | Maluku Utara         | 99.177                      | 106.920   | 87.537    | 89.217    | 117.210   | 91.977    |
| 33          | Papua Barat          | 211.720                     | 272.151   | 262.896   | 247.304   | 267.806   | 262.539   |
| 34          | Papua                | 414.637                     | 491.656   | 424.352   | 441.615   | 532.411   | 460.934   |
| <b>MEAN</b> |                      | 773.128                     | 834.823   | 762.240   | 811.775   | 861.684   | 808.730   |
| <b>STD</b>  |                      | 1.031.143                   | 1.081.183 | 1.050.298 | 1.075.607 | 1.155.057 | 1.078.658 |
| <b>KV</b>   |                      | 1.33                        | 1.30      | 1.38      | 1.33      | 1.34      | 1.34      |
| <b>MAX</b>  |                      | 4.294.254                   | 4.961.541 | 4.733.520 | 4.593.236 | 5.702.274 | 4.856.965 |
| <b>MIN</b>  |                      | 0                           | 64.448    | 65.246    | 67.799    | 63.035    | 52.106    |

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia.

Dari tabel 1.1 menjelaskan jumlah migran masuk seumur hidup pada tiap provinsi di Indonesia. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa tiap provinsi di Indonesia mengalami fluktuasi dalam segi mobilitas penduduk pada setiap tahunnya. Diketahui bahwa provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan angka migrasi masuk paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia pada kurun waktu 2013 sampai dengan 2017. Arus migrasi masuk tertinggi Jawa Barat yakni pada tahun 2017 yang mencapai 5.702.274 jiwa . Kemudian diikuti oleh DKI Jakarta dengan jumlah migrasi masuk mencapai 3.719.635 jiwa. Dapat dilihat pula juga bahwa provinsi Riau, Lampung, Banten, serta Kalimantan Timur memiliki jumlah migran masuk yang cukup banyak yakni di atas 1 juta jiwa pada tiap tahunnya. Di sisi lain Gorontalo merupakan provinsi dengan migran masuk terkecil yakni hanya berkisar 60 ribu jiwa pada kurun waktu 2013 sampai dengan 2017.

Peningkatan jumlah migran masuk ini tidak lain dipicu oleh daya tarik masing-masing provinsi. Provinsi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang besar serta didukung oleh struktur masyarakat yang dinamis terhadap perubahan dunia luar tentu akan menarik minat masyarakat untuk bermigrasi ke provinsi tersebut. Menurut Todaro (2015) ada korelasi positif antara tingkat pendidikan dengan kecenderungan orang bermigrasi atau *propensity to migrate*. Dimana seseorang yang memiliki pendidikan lebih tinggi berkemungkinan lebih besar untuk melakukan migrasi apabila kesenjangan pendapatan, kesempatan bekerja, serta fasilitas sosial daerah semakin berkurang. Berikut data laju perkembangan migrasi pada tiap provinsi di Indonesia :

**Tabel 1.2 Laju Perkembangan Migrasi Masuk Per Provinsi di Indonesia  
Tahun 2014-2017**

| No | Provinsi             | Laju Perkembangan Migrasi Masuk (%) |        |       |       |
|----|----------------------|-------------------------------------|--------|-------|-------|
|    |                      | 2014                                | 2015   | 2016  | 2017  |
| 1  | Aceh                 | 38.11                               | -24.26 | 12.85 | 15.25 |
| 2  | Sumatera Utara       | 12.91                               | -8.96  | -3.8  | 14.97 |
| 3  | Sumatera Barat       | 25.92                               | -12.39 | 6.85  | 21.06 |
| 4  | Riau                 | 1.37                                | -5.97  | 2.82  | 11.38 |
| 5  | Jambi                | 7.29                                | -5.88  | -1.11 | 6.78  |
| 6  | Sumatera Selatan     | 5.48                                | -3.95  | -5.84 | 5.31  |
| 7  | Bengkulu             | -1.63                               | -10.79 | 8.95  | 6.13  |
| 8  | Lampung              | 0.16                                | -1.7   | 1.17  | -2.04 |
| 9  | Kep. Bangka Belitung | 2.17                                | -10.5  | 10.59 | 19.9  |
| 10 | Kep. Riau            | 6.75                                | -8.58  | 3.57  | 9.45  |
| 11 | DKI Jakarta          | 2.58                                | -0.16  | 5.74  | -3.4  |
| 12 | Jawa Barat           | 15.54                               | -4.6   | -2.96 | 24.15 |
| 13 | Jawa Tengah          | 18.55                               | -4.99  | -1.02 | 6.75  |
| 14 | DI Yogyakarta        | 6.45                                | -1.17  | -0.99 | 8.66  |
| 15 | Jawa Timur           | 26.47                               | -7.72  | 3.43  | 9.64  |
| 16 | Banten               | -1.85                               | 1.15   | -2.14 | 2.19  |
| 17 | Bali                 | 20.61                               | -15.48 | 16.82 | 9.83  |
| 18 | Nusa Tenggara Barat  | 64.41                               | -19.75 | 17.99 | 4.84  |
| 19 | Nusa Tenggara Timur  | 6.58                                | -1.29  | 2.25  | 22.02 |
| 20 | Kalimantan Barat     | 12.08                               | -9.98  | 7.27  | 3.26  |
| 21 | Kalimantan Tengah    | 13.18                               | -3.55  | 1.16  | 9.38  |
| 22 | Kalimantan Selatan   | 8.98                                | -4.92  | 1.07  | 0.75  |
| 23 | Kalimantan Timur     | -10.41                              | -13.23 | 11.44 | 0.1   |
| 24 | Kalimantan Utara     | -                                   | -4.09  | 21.37 | 4.11  |
| 25 | Sulawesi Utara       | 9.31                                | -21.46 | 7     | 20.88 |
| 26 | Sulawesi Tengah      | 3.99                                | -8.35  | 1.3   | 7     |
| 27 | Sulawesi Selatan     | 14.37                               | -4.45  | 17.21 | 9.92  |
| 28 | Sulawesi Tenggara    | 1.26                                | -6.72  | 5.71  | 5.36  |
| 29 | Gorontalo            | 11.57                               | 1.24   | 3.91  | -7.03 |
| 30 | Sulawesi Barat       | 1.01                                | -6.47  | -0.04 | 9.93  |
| 31 | Maluku               | 17.46                               | -12.57 | 1.87  | 14.33 |
| 32 | Maluku Utara         | 7.81                                | -18.13 | 1.92  | 31.38 |
| 33 | Papua Barat          | 28.54                               | -3.4   | -5.93 | 8.29  |
| 34 | Papua                | 18.58                               | -13.69 | 4.07  | 20.56 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia.

Tabel 1.2 menjelaskan laju perkembangan migrasi masuk pada setiap provinsi di Indonesia. Dapat dilihat pada tahun 2014 laju perkembangan migrasi masuk yang paling tinggi yakni pada provinsi Nusa Tenggara Barat yakni mencapai 64.41%. Sedangkan pada tahun 2015 terjadi penurunan jumlah migran masuk di lebih dari setengah provinsi yang ada di Indonesia, hal tersebut dikarenakan oleh masalah perekonomian serta sedikit guncangan politik akibat peralihan kepala pemerintahan. Pada tahun 2016 provinsi dengan laju migran masuk tertinggi adalah Kalimantan Utara yakni sebesar 21.37%. Hal tersebut dikarenakan adanya ketertarikan masyarakat untuk melakukan migrasi sebab Kalimantan Utara merupakan provinsi baru di Indonesia. Serta pada tahun 2017 laju migrasi masuk tertinggi yakni pada provinsi Maluku Utara yaitu sebesar 31.38%.

Namun, selain dampak positif tentu lonjakan jumlah migran masuk akan memberikan dampak negatif, baik terhadap daerah tujuan maupun daerah asal. Salah satu dampak dari besarnya jumlah migrasi masuk adalah peningkatan jumlah pengangguran.

Pengangguran merupakan masyarakat yang tergolong angkatan kerja, namun masih belum mendapatkan pekerjaan. Pengangguran disebabkan karena laju pertumbuhan penduduk (pencari kerja) lebih besar daripada laju pertumbuhan lapangan pekerjaan yang tersedia. Ada beberapa faktor yang membuat seseorang tergolong kepada pengangguran, yakni masih belum menemukan pekerjaan, terkena PHK, ketidakcocokkan skill para pencari kerja, sedikitnya ketersediaan lapangan, kurangnya informasi lowongan pekerjaan, kurang meratanya distribusi lapangan pekerjaan, belum maksimalnya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah,

serta yang paling mempengaruhi masyarakat adalah budaya malas dan mudah menyerah. Ketiadaan pendapatan menyebabkan para penganggur menekan jumlah konsumsinya serta dapat menurunkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Sebab, di beberapa negara berkembang khususnya di Indonesia, perekonomian masyarakat sebagian besar masih tergantung pada lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pengangguran biasanya merupakan mereka yang baru menyelesaikan pendidikan menengah ataupun pendidikan tinggi yang rela menunggu lama demi mendapatkan pekerjaan pada sektor industri atau modern (Mudrajad, 2006). Dengan begitu, besar kemungkinan mereka akan bermigrasi ke daerah-daerah atau provinsi yang kegiatan industri yang sudah berkembang.

Pada dasarnya, tingkat pengangguran terbuka akan cenderung tinggi pada provinsi dengan sektor ekonomi industri modern, sebaliknya akan cenderung rendah pada provinsi yang bertumpu pada sektor pertanian. Berdasarkan tabel 1.3 di bawah dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 pada masing-masing provinsinya. Pada tahun 2013 tercatat jumlah pengangguran terbuka di Indonesia sebesar 7.388.700 jiwa. Memasuki tahun 2014 terjadi penurunan menjadi sebesar 7.244.900 jiwa. Setelah itu kembali naik pada tahun 2015 menjadi 7.560.800 jiwa, dan kemudian turun lagi memasuki 2016 menjadi 7.031.800 jiwa. Hingga pada tahun 2017 jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai angka 7.040.300 jiwa. Berikut data jumlah pengangguran terbuka masing-masing provinsi di Indonesia :

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2013-2017**

| No | Provinsi             | Tingkat Pengangguran Terbuka (Jiwa) |           |           |           |           | MEAN      |
|----|----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |                      | 2013                                | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      |           |
| 1  | Aceh                 | 209.500                             | 191.500   | 216.800   | 170.900   | 150.300   | 187.800   |
| 2  | Sumatera Utara       | 412.200                             | 390.700   | 428.800   | 371.700   | 377.300   | 396.140   |
| 3  | Sumatera Barat       | 150.800                             | 151.700   | 161.600   | 125.900   | 138.700   | 145.740   |
| 4  | Riau                 | 144.500                             | 176.800   | 217.100   | 222.000   | 184.600   | 189.000   |
| 5  | Jambi                | 70.400                              | 79.800    | 70.300    | 67.700    | 66.800    | 71.000    |
| 6  | Sumatera Selatan     | 182.400                             | 192.900   | 238.900   | 180.200   | 181.100   | 195.100   |
| 7  | Bengkulu             | 39.900                              | 31.300    | 46.700    | 32.900    | 36.300    | 37.420    |
| 8  | Lampung              | 210.500                             | 184.800   | 196.900   | 190.300   | 176.300   | 191.760   |
| 9  | Kep. Bangka Belitung | 22.900                              | 32.700    | 41.900    | 18.300    | 26.400    | 28.440    |
| 10 | Kep. Riau            | 56.600                              | 58.800    | 55.300    | 71.600    | 69.200    | 62.300    |
| 11 | DKI Jakarta          | 467.200                             | 429.100   | 368.200   | 317.000   | 346.900   | 385.680   |
| 12 | Jawa Barat           | 1.870.600                           | 1.775.200 | 1.794.900 | 1.873.900 | 1.839.400 | 1.830.800 |
| 13 | Jawa Tengah          | 1.022.700                           | 996.300   | 863.800   | 801.300   | 823.900   | 871.325   |
| 14 | DI Yogyakarta        | 63.900                              | 67.400    | 80.200    | 57.000    | 64.000    | 66.500    |
| 15 | Jawa Timur           | 871.300                             | 843.500   | 906.900   | 839.300   | 838.500   | 859.900   |
| 16 | Banten               | 509.300                             | 484.100   | 509.400   | 498.600   | 519.600   | 504.200   |
| 17 | Bali                 | 41.500                              | 44.100    | 47.200    | 46.500    | 36.100    | 43.080    |
| 18 | Nusa Tenggara Barat  | 112.700                             | 127.700   | 128.400   | 97.000    | 79.400    | 109.040   |
| 19 | Nusa Tenggara Timur  | 67.800                              | 73.200    | 88.400    | 76.600    | 78.500    | 76.900    |
| 20 | Kalimantan Barat     | 86.300                              | 93.700    | 121.300   | 100.900   | 105.100   | 101.460   |
| 21 | Kalimantan Tengah    | 33.900                              | 38.700    | 58.800    | 63.200    | 54.000    | 49.720    |
| 22 | Kalimantan Selatan   | 71.400                              | 73.800    | 97.700    | 113.300   | 99.000    | 91.040    |
| 23 | Kalimantan Timur     | 142.100                             | 133.700   | 115.500   | 136.700   | 114.300   | 128.460   |
| 24 | Kalimantan Utara     | -                                   | -         | 16.100    | 15.100    | 18.300    | 9.900     |
| 25 | Sulawesi Utara       | 67.700                              | 80.000    | 99.200    | 73.200    | 80.500    | 80.120    |
| 26 | Sulawesi Tengah      | 52.400                              | 49.400    | 56.800    | 49.700    | 54.400    | 52.540    |
| 27 | Sulawesi Selatan     | 176.900                             | 188.800   | 220.600   | 186.300   | 213.700   | 197.260   |
| 28 | Sulawesi Tenggara    | 45.200                              | 48.100    | 63.100    | 34.100    | 39.600    | 46.020    |
| 29 | Gorontalo            | 19.300                              | 20.900    | 24.100    | 15.500    | 23.500    | 20.660    |
| 30 | Sulawesi Barat       | 12.500                              | 12.700    | 20.600    | 21.500    | 19.700    | 17.400    |
| 31 | Maluku               | 64.700                              | 70.700    | 72.200    | 52.400    | 65.700    | 65.140    |
| 32 | Maluku Utara         | 17.900                              | 25.500    | 31.100    | 21.000    | 27.500    | 24.600    |
| 33 | Papua Barat          | 17.100                              | 20.000    | 33.400    | 32.500    | 28.000    | 26.200    |
| 34 | Papua                | 54.500                              | 57.700    | 69.500    | 57.700    | 63.800    | 60.640    |
|    | <b>MEAN</b>          | 217.312                             | 213.097   | 222.403   | 206.818   | 207.071   | 213.340   |
|    | <b>STD</b>           | 374.469                             | 355.703   | 351.129   | 356.060   | 353.070   | 358.086   |

|  |            |           |           |           |           |           |           |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | <b>KV</b>  | 1.72      | 1.67      | 1.58      | 1.72      | 1.71      | 1.68      |
|  | <b>MAX</b> | 1.870.600 | 1.775.200 | 1.794.900 | 1.873.900 | 1.839.400 | 1.830.800 |
|  | <b>MIN</b> | 0         | 0         | 16.100    | 15.100    | 18.300    | 9.900     |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia.*

Dari tabel 1.3 di atas juga terlihat bahwa jumlah pengangguran terbuka yang paling banyak berada pada provinsi Jawa Barat yakni mencapai 1.830.800 jiwa, sedangkan yang paling rendah yakni pada provinsi Kalimantan Utara yakni hanya sebesar 9.900 jiwa. Hal ini juga disebabkan kurangnya minat masyarakat untuk bermigrasi ke Kalimantan Utara yang merupakan provinsi baru dimana provinsi ini dianggap kurang memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat yang mencari pekerjaan ataupun masyarakat miskin yang ingin mencari pekerjaan.

Kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak dikarenakan tidak memiliki pendapatan atau pendapatan yang diterima tidak bisa mencukupi pemenuhan kebutuhan hidup. Menurut Todaro (2006) kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak, seperti rendahnya kemampuan pendapatan, kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang nantinya juga berlanjut pada ketidakmampuan untuk memenuhi tingkat kesehatan dan pendidikan. Dalam hal ini, kemiskinan disebabkan oleh ketidakberdayaan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak sehingga berdampak pada rendahnya skill yang dimiliki. Persentase kemiskinan di Indonesia masih terbilang cukup tinggi dan bervariasi di masing-masing provinsi yang disebabkan oleh banyak hal, seperti laju pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, serta kondisi SDM dan SDA yang dimiliki. Berikut data jumlah penduduk miskin di Indonesia :

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Penduduk Miskin Per Provinsi di Indonesia Tahun**  
**2013-2017**

| Provinsi             | Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) |                |                |                |                | MEAN           |
|----------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                      | 2013                          | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |                |
| Aceh                 | 156.800                       | 158.040        | 155.810        | 163.020        | 166.770        | 160.088        |
| Sumatera Utara       | 689.210                       | 667.470        | 727.760        | 690.340        | 663.270        | 687.610        |
| Sumatera Barat       | 124.890                       | 108.530        | 118.480        | 119.510        | 114.590        | 117.200        |
| Riau                 | 162.710                       | 159.530        | 174.790        | 164.120        | 176.980        | 167.626        |
| Jambi                | 106.360                       | 109.070        | 125.600        | 116.330        | 118.490        | 115.170        |
| Sumatera Selatan     | 375.960                       | 370.860        | 360.730        | 377.880        | 379.720        | 373.030        |
| Bengkulu             | 97.660                        | 99.590         | 106.000        | 98.070         | 97.150         | 99.694         |
| Lampung              | 222.750                       | 224.210        | 197.940        | 227.440        | 211.970        | 216.862        |
| Kep. Bangka Belitung | 23.070                        | 20.270         | 18.830         | 19.370         | 23.040         | 20.916         |
| Kep. Riau            | 95.340                        | 91.270         | 83.090         | 86.190         | 96.770         | 90.532         |
| DKI Jakarta          | 375.700                       | 412.790        | 368.670        | 385.840        | 393.130        | 387.226        |
| Jawa Barat           | 2.626.160                     | 2.554.060      | 2.706.520      | 2.543.300      | 2.391.230      | 2.564.254      |
| Jawa Tengah          | 1.870.730                     | 1.771.530      | 1.789.570      | 1.879.550      | 1.815.580      | 1.825.392      |
| DI Yogyakarta        | 325.530                       | 324.430        | 292.640        | 301.250        | 298.390        | 308.448        |
| Jawa Timur           | 1.622.030                     | 1.531.890      | 1.571.150      | 1.552.770      | 1.455.450      | 1.546.658      |
| Banten               | 414.460                       | 381.180        | 418.950        | 380.160        | 415.670        | 402.084        |
| Bali                 | 105.140                       | 109.200        | 115.800        | 93.740         | 96.070         | 103.990        |
| Nusa Tenggara Barat  | 364.080                       | 385.310        | 377.280        | 378.830        | 368.550        | 374.810        |
| Nusa Tenggara Timur  | 98.050                        | 105.700        | 97.060         | 112.480        | 119.040        | 106.466        |
| Kalimantan Barat     | 77.770                        | 78.530         | 88.150         | 75.980         | 83.890         | 80.864         |
| Kalimantan Tengah    | 45.760                        | 39.450         | 48.720         | 40.610         | 48.340         | 44.576         |
| Kalimantan Selatan   | 60.970                        | 61.210         | 72.480         | 60.900         | 66.210         | 64.354         |
| Kalimantan Timur     | 98.880                        | 98.480         | 80.820         | 89.640         | 102.390        | 94.042         |
| Kalimantan Utara     | 0.000                         | 0.000          | 13.320         | 17.250         | 21.810         | 10.476         |
| Sulawesi Utara       | 65.060                        | 60.080         | 58.000         | 59.730         | 59.950         | 60.564         |
| Sulawesi Tengah      | 64.320                        | 71.650         | 79.250         | 75.900         | 81.560         | 74.536         |
| Sulawesi Selatan     | 160.530                       | 154.400        | 157.180        | 150.600        | 166.500        | 157.842        |
| Sulawesi Tenggara    | 36.710                        | 45.790         | 56.770         | 53.180         | 67.960         | 52.082         |
| Gorontalo            | 22.840                        | 23.880         | 27.010         | 24.020         | 21.230         | 23.796         |
| Sulawesi Barat       | 24.590                        | 29.870         | 22.510         | 25.070         | 30.020         | 26.412         |
| Maluku               | 51.110                        | 47.580         | 51.600         | 54.240         | 47.830         | 50.472         |
| Maluku Utara         | 11.060                        | 11.170         | 8.290          | 12.450         | 12.930         | 11.180         |
| Papua Barat          | 12.850                        | 14.060         | 18.820         | 20.110         | 19.020         | 16.972         |
| Papua                | 45.410                        | 35.610         | 30.280         | 35.770         | 41.060         | 37.626         |
| <b>INDONESIA</b>     | 10.634.470                    | 10.356.690     | 10.619.860     | 10.485.640     | 10.272.550     | 10.473.842     |
| <b>MEAN</b>          | <b>312.779</b>                | <b>304.609</b> | <b>312.349</b> | <b>308.401</b> | <b>302.134</b> | <b>308.054</b> |

|     |           |           |           |           |           |           |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| STD | 579.956   | 556.865   | 580.190   | 565.622   | 534.064   | 563.339   |
| KV  | 1.82      | 1.79      | 1.86      | 1.83      | 1.77      | 1.81      |
| MAX | 2.626.160 | 2.554.060 | 2.706.520 | 2.543.300 | 2.391.230 | 2.564.254 |
| MIN | 0         | 0         | 8.290     | 12.450    | 12.930    | 6.734     |

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia.

Tabel 1.4 di atas menjelaskan jumlah penduduk miskin tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami fluktuasi pada jangka waktu periode tersebut. Pada periode 2013 ke 2014 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 277.780 jiwa. Sedangkan pada periode 2014 ke 2015 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 263.170 jiwa. Kemudian kembali mengalami penurunan sebesar 134.220 jiwa memasuki tahun 2016. Setahun kemudian pada 2017 angka tersebut mengalami penurunan kembali sebesar 213.090 jiwa. Karena sangat kompleks dan kronis, maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan dibutuhkan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer.

Berdasarkan fenomena di atas, untuk mengetahui hubungan antara migrasi, pengangguran, dan kemiskinan di Indonesia, oleh karena itu perlu adanya penelitian lebih lanjut, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“ANALISIS KAUSALITAS ANTARA MIGRASI, PENGANGGURAN, DAN KEMISKINAN DI INDONESIA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian tentang analisis kausalitas antara migrasi, pengangguran dan kemiskinan di Indonesia sebagai berikut :

1. Apakah terdapat kausalitas antara migrasi dan pengangguran di Indonesia ?
2. Apakah terdapat kausalitas antara migrasi dan kemiskinan di Indonesia ?
3. Apakah terdapat kausalitas antara pengangguran dan kemiskinan di Indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dan menganalisis

1. Kausalitas antara migrasi dan pengangguran di Indonesia.
2. Kausalitas antara migrasi dan kemiskinan di Indonesia.
3. Kausalitas antara pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dilakukannya penelitian ini diharapkan antara lain :

1. Bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan atau kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
3. Pengembangan Ilmu Ekonomi khususnya terkait dengan kajian Ekonomi Kesejahteraan Masyarakat.

## BAB II

### KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

#### A. Kajian Teori

##### 1. Migrasi

Teori migrasi mempelajari berbagai aspek yang mempengaruhi perpindahan penduduk untuk menetap dari satu tempat ke tempat lain yang melewati batas suatu negara maupun dalam batas administratif suatu negara. Umumnya, penduduk memilih bermigrasi ke daerah tujuan yang memiliki perekonomian yang baik, seperti di perkotaan.

Menurut Todaro dan Smith (2009) teori migrasi menjelaskan bahwa migrasi desa-kota adalah proses ekonomi yang rasional, terlepas dari tingginya pengangguran di perkotaan. Model migrasi Todaro memiliki empat karakteristik dasar, yakni : *Pertama*, pertimbangan ekonomi rasional dan aspek psikologis; *kedua*, perkiraan perbedaan upah antara desa dengan kota; *ketiga*, kemungkinan kesempatan kerja di perkotaan berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran di perkotaan; dan yang *keempat*, pengangguran di perkotaan merupakan hal yang tidak bisa dihindari, khususnya bagi negara padat penduduk.

Migrasi erat kaitannya sebagai jalan keluar bagi negara berkembang guna mengurangi jumlah penduduk miskin serta dapat meningkatkan produktivitas (MacCulloch dkk, 2006). Menurut BPS (2013) jenis migrasi yang ada yakni sebagai berikut; 1) Migrasi Masuk (*In Migration*); 2) Migrasi Keluar (*Out Migration*); 3) Migrasi Netto (*Net Migration*). Perhitungan migrasi adalah sebagai berikut :

## 1) Migrasi Masuk

$$Mi = \frac{inMig}{P} \times 1000 \dots \dots \dots (2.1)$$

Keterangan :

Mi : Angka Migrasi Masuk

In Mig : Jumlah Penduduk Masuk dalam Suatu Periode

P : Jumlah Penduduk pada Pertengahan Periode yang Sama

1000 : Konstanta

## 2) Migrasi Keluar

$$Mo = \frac{outMig}{P} \times 1000 \dots \dots \dots (2.2)$$

Keterangan :

Mo : Angka Migrasi Keluar

Out Mig : Jumlah Penduduk Keluar dalam Suatu Periode

P : Jumlah Penduduk pada Pertengahan Suatu Periode

1000 : Konstanta

## 3) Migrasi Netto

$$Mn = \frac{inMig - outMig}{P} \times 1000 \dots \dots \dots (2.3)$$

Keterangan :

Mi : Angka Migrasi Masuk

In Mig : Jumlah Penduduk Masuk dalam Suatu Periode

Out Mig : Jumlah Penduduk Keluar dalam Suatu Periode

P : Jumlah Penduduk pada Pertengahan Periode yang Sama

1000 : Konstanta

Menurut Hampshire (2002) migrasi menjadi pilihan terakhir bagi masyarakat miskin agar dapat keluar dari zona kemiskinan. Toersilaningsih (2009) menyatakan bahwa mobilitas penduduk akan berdampak pada proses pembangunan dan

sebaliknya pembangunan berdampak pada bentuk, pola, serta arah mobilitas penduduk. Beberapa faktor yang dipertimbangkan individu untuk bermigrasi yakni faktor keuntungan bermigrasi, selisih tingkat pendapatan yang diharapkan, serta probabilitas mendapatkan pekerjaan (Todaro, 2009).

Oleh karena itu, kecenderungan migrasi yang dilakukan oleh masyarakat pada suatu wilayah sepanjang hidupnya akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi wilayah tersebut, maka dibutuhkan analisis mengenai arus migrasi guna mengetahui keadaan dan kondisi ekonomi di berbagai provinsi di Indonesia.

## **2. Pengangguran**

Teori pengangguran merupakan teori yang mempelajari bagaimana seseorang yang merupakan angkatan kerja namun tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Menurut teorinya, Keynes mengatakan bahwa pasar tenaga kerja jauh dari seimbang, hal ini disebabkan oleh upah yang tidak fleksibel sehingga permintaan dan penawaran menjadi tidak seimbang dan mengakibatkan meningkatnya pengangguran (Mulyadi, 2014).

Pengangguran merupakan mereka yang mau bekerja, yang sedang mencari pekerjaan namun belum menemukan pekerjaan. Menurut Sumarsono (2009) pengangguran merupakan persentase jumlah penduduk yang menganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Pada dasarnya, pengangguran disebabkan karena terjadinya kelebihan penawaran tenaga kerja dibandingkan dengan permintaan tenaga kerja pada pasar tenaga kerja. Dengan kata lain, jumlah angkatan kerja yang ada di pasar tenaga kerja lebih besar dari jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan. Pada teorinya, perekonomian akan selalu menyerap tenaga kerja sepenuhnya (*full*

*employment*) namun pada kenyataannya selalu ada pekerja yang kehilangan pekerjaan dan sebagian yang menganggur mendapatkan pekerjaan.

Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak kunjung menemukan pekerjaan, serta penduduk yang mempunyai pekerjaan namun belum mulai bekerja (BPS, 2015). Tingkat pengangguran terbuka dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$TPT = \frac{\text{jumlah pengangguran}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100$$

Berdasarkan lama waktu kerja pengangguran dapat digolongkan menjadi; 1) Pengangguran terbuka, 2) Setengah menganggur, 3) Pengangguran terselubung. Sedangkan berdasarkan penyebab terjadinya pengangguran dapat digolongkan menjadi; 1) Pengangguran struktural, 2) Pengangguran Konjungtural, 3) Pengangguran friksional, 4) Pengangguran musiman. Mankiw (2000) menyatakan bahwa pengangguran akan selalu muncul pada suatu perekonomian yang dikarenakan proses pencarian kerja, dan kekakuan upah. Kekakuan upah tersebut disebabkan oleh tiga faktor yakni kebijakan upah minimum, daya tawar kolektif serikat pekerja, serta upah efisiensi. Menurut Marhaeni dan Manuati (2004) ada empat faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran, yakni tingkat upah, teknologi, modal, dan struktur perekonomian.

Maka, dapat diketahui bahwa pengangguran di Indonesia disebabkan oleh jumlah angkatan kerja yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja.

### 3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai oleh tingkat pengangguran, keterbelakangan, serta disusul oleh ketimpangan. Selain itu kemiskinan juga ditentukan oleh arus migrasi di dalamnya. Menurut BAPPENAS (2004) kemiskinan merupakan keadaan seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya, seperti kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Pendekatan yang digunakan BAPPENAS dalam menentukan kemiskinan antara lain :

- 1) Pendekatan kebutuhan dasar (*Basic need approach*)
- 2) Pendekatan pendapatan (*Income approach*)
- 3) Pendekatan kemampuan dasar (*Human capability approach*).

Meskipun persentase penduduk miskin cenderung menurun, namun perbandingan antara jumlah penduduk miskin di kota dan di pedesaan selalu menjadi masalah yang belum dapat dijawab oleh pemerintah. Penduduk yang rata-rata pengeluaran perkapita perbulannya di bawah garis kemiskinan maka dikategorikan sebagai penduduk miskin. Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan :

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p} \dots \dots \dots (2.4)$$

Dimana :

- %PM<sub>p</sub> : Persentase penduduk miskin di provinsi (p)  
 PM<sub>p</sub> : Jumlah penduduk miskin di provinsi (p)  
 P<sub>p</sub> : Jumlah penduduk di provinsi (p)

Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pendapatan seseorang, dimana seseorang yang pendapatannya kurang dari US\$ 1,25 per hari dan US\$ 2

per hari termasuk dalam kategori penduduk miskin (World Bank, 2009). Menurut Todaro dan Smith (2009) tiga macam ukuran kemiskinan yakni kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, serta indeks kemiskinan multidimensi.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka selain dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah itu sendiri, maka faktor lain yang menjadi penentu kemiskinan suatu daerah adalah jumlah migran serta tingkat pengangguran.

## **B. Hubungan Antar Variabel**

### **1) Hubungan Migrasi dan Pengangguran di Indonesia**

Sebagaimana teori Lewis (Mulyadi, 2014) yang menyatakan bahwa kecenderungan masyarakat untuk melakukan migrasi/berpindah dikarenakan perbedaan yang cukup signifikan antara sektor perekonomian desa dan kota. Maksudnya, masyarakat memilih untuk berpindah dari desa ke kota dengan harapan dapat menemukan pekerjaan dan memutus rantai kemiskinan. Hubungan antara migrasi dan pengangguran adalah semakin tinggi jumlah migrasi ke suatu daerah maka akan berdampak pada semakin tinggi jumlah pengangguran. Hal ini disebabkan apabila laju migrasi masuk ke daerah tersebut lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan lapangan pekerjaan yang tersedia. Berdasarkan penelitian Yulianto (2008) bahwa arus migrasi yang masuk ke Kalimantan Timur secara signifikan berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran di Kalimantan Timur. Hal tersebut disebabkan oleh migrasi yang masuk tidak memiliki *skill* yang mumpuni sehingga kalah dalam persaingan mencari pekerjaan dan kemudian menjadi pengangguran.

Kecenderungan penduduk untuk melakukan migrasi ke daerah perkotaan yang padat penduduk membuat lonjakan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan di daerah tersebut. Keadaan ini terus berlangsung walaupun penduduk telah mengetahui bahwa daerah tujuan mereka merupakan daerah padat penduduk. Menurut Ghatak dan Moore (2007) migrasi mempunyai pengaruh yang besar terhadap pasar tenaga kerja, khususnya pada tingkat pengangguran.

Menurut Sumarsono (2009) pengangguran merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terjadi akibat tidak seimbangnya jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Sehingga, mereka yang tidak beruntung untuk mendapatkan pekerjaan menjadi pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran memungkinkan para penduduk untuk memilih melakukan migrasi demi mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih layak.

Menurut Mulyadi (2014), munculnya pengangguran dalam perekonomian disebabkan oleh :

- 1) Proses mencari kerja.
- 2) Kekakuan upah.
- 3) Efisiensi upah.

Dalam hal ini, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Myrdal bahwa dampak balik migrasi yakni tertariknya orang-orang muda atau angkatan kerja ke daerah tujuan sehingga membuat daerah asal menjadi kekurangan tenaga kerja serta menekan perekonomian di daerah asal tersebut (Jhingan, 2012).

Hubungan antara pengangguran dan migrasi adalah semakin tinggi tingkat pengangguran di suatu daerah, baik itu disebabkan oleh kurangnya lapangan

pekerjaan ataupun rendahnya tingkat upah, maka akan semakin tinggi kemungkinan seseorang untuk melakukan migrasi demi mendapatkan pekerjaan yang lebih layak (Mulyadi, 2014). Di sisi lain, dalam jangka pendek bagi perkotaan adalah semakin meningkatnya PAD seiring dengan kontribusi dari tenaga kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan. Namun dalam jangka panjang, lonjakan migrasi yang terus menerus akan berdampak pada semakin padatnya jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan laju pertumbuhan lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini akan membuat melonjaknya tingkat pengangguran di perkotaan. Angka pengangguran yang tinggi di perkotaan merupakan salah satu persoalan yang sulit untuk dihindari, terkhususnya bagi negara berkembang dengan populasi tenaga kerja yang tinggi.

## **2) Hubungan Migrasi dan Kemiskinan di Indonesia**

Sebagaimana di dalam teori yang dikemukakan oleh Malthus dan Ricardo bahwa lonjakan jumlah penduduk atau angkatan kerja yang tidak diiringi dengan kemajuan sumber daya yang lain maka akan menyebabkan kemakmuran masyarakat mundur atau dengan kata lain mengarah pada kemiskinan (Jhingan, 2012). Hubungan antara migrasi dan kemiskinan adalah dengan semakin banyaknya masyarakat yang bermigrasi ke suatu daerah, maka dampak jangka panjangnya adalah bertambahnya jumlah pengangguran di daerah tersebut. Berdasarkan penelitian Taryono, dkk (2009) menjelaskan bahwa laju perkembangan penduduk di Kabupaten Pelalawan sebagian besar dipengaruhi oleh tingginya arus migrasi yang masuk, dan bukan oleh tingkat angka kelahiran. Hal ini berdampak pada semakin ketatnya persaingan untuk mendapatkan sebuah

pekerjaan, serta tidak mencukupinya lapangan pekerjaan yang tersedia. Kemudian hal ini akan berimbas pada meningkatnya jumlah pengangguran di daerah tersebut. Tentunya para pengangguran ini tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, yang semakin lama akan semakin mendekatkan hidup pengangguran tersebut pada kemiskinan.

Penduduk yang memilih untuk melakukan migrasi mayoritas masih memiliki pemikiran yang kuno, dimana mereka berpikir bahwa jika mereka melakukan migrasi untuk mencari sebuah pekerjaan, maka mereka pasti akan mendapatkan pekerjaan. Hal ini harusnya menjadi pertimbangan bagi para penduduk sebelum melakukan migrasi. Menurut Vakulenko, et al (2015) arus migrasi lebih tinggi ke daerah dengan pendapatan yang tinggi, sedangkan di daerah dengan pendapatan rendah arus migrasi cenderung rendah..

Kemiskinan merupakan implikasi yang disebabkan oleh lonjakan tingkat migrasi. Pengetahuan tentang keadaan daerah tujuan, jumlah penduduk (para pencari kerja), dan kondisi ekonomi dari daerah tujuan harus dimiliki oleh para imigran. Namun sayangnya, pada jangka panjang dari siklus migrasi ini apabila tidak diiringi oleh laju pertumbuhan lapangan pekerjaan maka akan memperbesar *poverty gap*. Hal ini juga diperkuat oleh para penduduk yang melakukan migrasi, namun tidak meningkatkan skill atau kemampuan mereka, sehingga dengan semakin sulitnya mereka mendapatkan pekerjaan, tentu akan berimbas pada meningkatnya tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Menurut Park, et al (2005) migrasi cenderung dilakukan oleh masyarakat yang perekonomiannya tinggi,

sedangkan masyarakat berpenghasilan rendah cenderung tidak melakukan migrasi sebab ketidakmampuan modal untuk bermigrasi.

### **3) Hubungan Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia**

Menurut Todaro (2003) dengan meluasnya tingkat kemiskinan dapat menyebabkan penduduk miskin tidak dapat meningkatkan pendidikan, serta memperkecil peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Sebagaimana teori yang dijelaskan diatas maka hubungan antara pengangguran dan kemiskinan adalah semakin banyaknya masyarakat yang menganggur pada suatu daerah, maka secara langsung akan berdampak pada semakin tingginya tingkat kemiskinan pada daerah tersebut. Berdasarkan penelitian Yacoub (2012) bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Salah satu hal yang sangat erat yang dapat mempengaruhi jumlah pengangguran adalah ketersediaan lapangan pekerjaan serta kemampuan (*skill*) dari para pencari kerja. Tingginya tingkat persaingan serta tidak seimbangnya antara jumlah lapangan pekerjaan dan angkatan kerja membuat masyarakat dituntut harus memiliki kemampuan dan daya saingnya.

Maka yang perlu digaris bawahi oleh pemerintah dan masyarakat sebagaimana teori di atas adalah bagaimana sumber daya manusia dan lapangan pekerjaan memiliki pertumbuhan yang baik sehingga tidak berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran yang nantinya akan berujung pada tingginya jumlah masyarakat miskin.

### **C. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini penulis tentunya memerlukan kajian terdahulu atau penelitian empiris sejenis untuk mendukung penelitian yang penulis lakukan. Dimana nantinya dapat digunakan sebagai referensi untuk melihat apakah penelitian yang dilakukan mendukung atau tidak dengan penelitian sebelumnya.

Latif (2015) dalam penelitiannya, menggunakan data panel provinsi dan didapatkan hasil bahwa terjadi hubungan kausalitas antara migrasi, pengangguran, dan GDP perkapita pada jangka panjang.

Penelitian Taryono, et al (2009) menggunakan metode analisis data kualitatif untuk menganalisis faktor pendorong, penarik, dan penghambat terjadinya arus migrasi penduduk. Penelitian ini menunjukkan hubungan migrasi dengan tingkat kemiskinan.

Yulianto (2008) dalam penelitiannya menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan jumlah pengangguran yang disebabkan oleh tingginya arus migrasi masuk ke wilayah Kalimantan Timur.

Penelitian Boubtane, et al (2013) bahwa di negara-negara maju migrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran, namun di beberapa negara berkembang arus migrasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Maka, berdasarkan penelitian-penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara masing-masing variabel yang diteliti, baik antara migrasi dan pengangguran, migrasi dan kemiskinan, ataupun pengangguran dan kemiskinan.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Berdasarkan teori, migrasi berhubungan positif dengan pengangguran, dimana semakin tinggi tingkat migrasi, maka akan semakin tinggi pula tingkat pengangguran. Hal ini dikarenakan laju migrasi penduduk yang besar dan tidak sebanding dengan laju pertumbuhan lapangan pekerjaan.

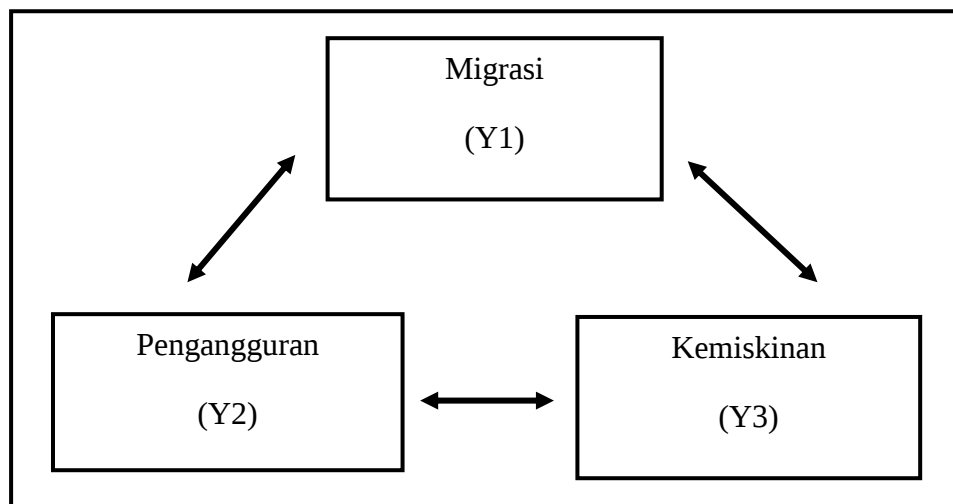
Berdasarkan teori, migrasi berhubungan positif dengan kemiskinan, dimana semakin tinggi laju migrasi masuk, maka tingkat kemiskinan akan semakin meningkat dikarenakan para penduduk yang bermigrasi banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan sebab terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan. Dengan menganggur, maka mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan kemudian dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Berdasarkan teori, pengangguran berhubungan positif dengan migrasi. Dimana pengangguran pada umumnya seringkali terjadi karena para angkatan kerja yang bermigrasi tidak mendapat pekerjaan sebab lapangan pekerjaan yang terbatas.

Berdasarkan teori, pengangguran berhubungan positif dengan kemiskinan. Dimana semakin besar jumlah pengangguran maka akan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Hal ini disebabkan penganggur tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai pendapatan sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga ia dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Berdasarkan teori, kemiskinan berhubungan positif dengan migrasi. Dimana penduduk miskin yang ingin merubah hidup menjadi lebih layak akan cenderung untuk bermigrasi ke daerah yang prospek perekonomiannya lebih baik.

Berdasarkan teori, kemiskinan berhubungan positif dengan pengangguran. Dimana semakin tinggi angka kemiskinan, maka hal tersebut menggambarkan tingginya tingkat pengangguran di daerah tersebut. Sebab, penduduk miskin merupakan mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan.



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Analisis Hubungan Kausalitas Antara Migrasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia.**

#### **E. Hipotesis**

Sebagai jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Terdapat kausalitas antara migrasi dan pengangguran di Indonesia.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Terdapat kausalitas antara migrasi dan kemiskinan di Indonesia.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Terdapat kausalitas antara pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan metode VAR, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil dalam pengujian ini menunjukkan tidak terdapat kausalitas antara migrasi dan pengangguran. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai probabilitas masing-masing variabel yakni ( $0.8683 > 0.05$ ) dan ( $0.0016 < 0.05$ ). Namun terdapat hubungan satu arah antara pengangguran terhadap migrasi yakni dengan probabilitas ( $0.0016 < 0.05$ ). Dari hasil analisis Granger Causality terdapat asumsi  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak untuk migrasi terhadap pengangguran, sedangkan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima untuk pengangguran terhadap migrasi.
2. Hasil dalam pengujian ini menunjukkan terdapat kausalitas antara migrasi dan kemiskinan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai probabilitas masing-masing variabel yakni ( $0.0252 < 0.05$ ) dan ( $0.0325 < 0.05$ ). Berdasarkan hasil analisis Granger Causality terdapat asumsi  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima terhadap kedua variabel tersebut.
3. Hasil dalam pengujian ini menunjukkan adanya kausalitas antara pengangguran dan kemiskinan. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai probabilitas masing-masing variabel yakni ( $0.0181 < 0.05$ ) dan ( $0.0328 < 0.05$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima untuk kedua variabel tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan serta kesimpulan dari penelitian ini, ada beberapa saran yang peneliti ajukan :

1. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan secara menyeluruh agar tidak terdapat lagi adanya ketimpangan taraf hidup masyarakat di beberapa daerah.
2. Perlunya perluasan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengimbangi dari laju pertumbuhan penduduk.
3. Melalui pemerintah pusat, pemerintah di setiap provinsi perlu memberikan pembekalan skill dan keterampilan kepada masyarakat sehingga para pencari kerja yang belum mempunyai skill dan keterampilan yang baik tetap bisa bersaing untuk mendapatkan pekerjaan.
4. Perlu pengendalian secara menyeluruh mengenai mobilitas penduduk (migrasi) agar tidak terjadi penumpukan jumlah penduduk pada suatu provinsi/daerah sehingga kualitas dan kuantitas SDM pada setiap provinsi di Indonesia tetap terjaga keseimbangannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2016. *Statistik Mobilitas dan Ketenagakerjaan 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- \_\_\_\_\_. 2017. *Statistik Mobilitas dan Ketenagakerjaan 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Borjas, George J. 2000. *Economics of Migration, International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences*. Harvard University.
- Boubtane. 2013. *Immigration, unemployment and GDP in the host country: Bootstrap panel Granger causality analysis on OECD countries*. France: University of Auvergne.
- Lewis, G. J. 1982. *Human Migration, A Geographical Perspective*. London Croom Helm.
- Michael P. Todaro. 2006. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga 1*. Jakarta: Erlangga.
- Mulyadi. S. 2014. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Persada.
- Park Albert, Yang D, dan Sangui W. 2005. *Migration and Rural Poverty in China*. Chinese Academy of Agricultural Sciences: China
- Parulihan, Gerald. 2012. *Fenomena Migrasi dan Permasalahan Tenaga Kerja di Kelurahan Organ Baru Kota Palembang*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Pratama, Annugrah Mujito. 2013. *Analisis Faktor yang Mendorong Seseorang untuk Melakukan Migrasi Ulang-Alik ke Surabaya dengan Menggunakan Transportasi Bus*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya: Malang
- Sumarsono, Sonny. 2009. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Taryono, Rita Y dan Rahmita B Ningsih. 2009. *Studi Tentang Migrasi dan Implikasinya Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Pelalawan*.
- Todaro, Smith. 2009. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga